

## Minoritas, Hubungan Islam-Kristen dan Persoalan Konstruksi Sosial Islam di Indonesia saat ini

**Muhammad Nurkhoiron**

*Pemerhati dan Peneliti Sosial  
Budaya serta Ketua Yayasan  
Desantara, Institute for Cultural  
Studies*



Melalui kajian multikulturalisme, perdebatan minoritas diletakkan di dalam ruang lingkup pembicaraan mengenai minoritas yang tidak semata-mata berhubungan dengan sekelompok kecil masyarakat (kecil dari segi jumlah). Minoritas di sini menjadi masalah krusial ketika sekelompok kecil masyarakat memperlihatkan ciri budaya terutama ekspresi keagamaan atau keyakinan spesifik yang berbeda secara asimetris dengan penduduk setempat. Cara pandang yang berbeda tidak jarang melahirkan pandangan-pandangan yang konfliktual di antara mereka. Banyak kalangan yang melihat bahwa konflik agama, hubungannya dengan isu mayoritas dan minoritas, disebabkan oleh konservatisme agama. Namun, tidak banyak yang melihat problem lain yang sebetulnya lebih mendasar. Inilah yang akan menjadi fokus dari tulisan ini.

Masalah minoritas adalah salah satu isu yang paling hangat sampai saat ini. Sebagaimana telah terjadi di hampir semua negara, masalah minoritas menjadi isu kunci atas keberadaan masyarakat yang plural, suatu kondisi yang tak terelakkan di masa sekarang. Dalam kaitan ini, konsep minoritas berhubungan dengan terma perbedaan (*difference*). Ada beberapa gagasan tentang bagaimana perbedaan ini berlangsung dan dicermati. Studi paling mutakhir memetakan perbedaan sebagai hasil tak terelakkan dari proyek modernitas. Meta naratif modernitas pencerahan yang dikenalkan Barat melalui proyek kolonisasi menciptakan situasi di mana perbedaan adalah sesuatu yang terstruktur, terkodifikasi, dan terlembaga Perbedaan menciptakan skema mayoritas-minoritas. Hal ini dapat dilihat sebagai hasil relasi satu kelompok dengan kelompok lain yang saling memandang secara eksklusif. Adanya sudut pandang yang eksklusif, bagaimana suatu kelompok dilihat secara berbeda, sebagai *liyan* (*the other*) memicu konflik yang mematikan. Di antara masalah minoritas yang beragam, masalah paling pelik dan selalu menjadi perdebatan hangat di Indonesia adalah masalah-masalah minoritas yang berkaitan dengan isu agama.

Meskipun demikian, perdebatan di Indonesia mengenai minoritas sebagian besar, jika bukan seluruhnya, sayangnya lebih memperdalam esensialisme budaya untuk merunut sumber-sumber penye-

babnya.<sup>1</sup> Misalnya melalui rubrik konflik Islam-Kristen, beberapa pandangan memperdebatkan persoalan konservatisme beragama, menyalahkan doktrin-doktrin kolot diperbandingkan dengan pandangan-pandangan moderat dan terbuka. Polemik seperti berlangsung secara gencar bahkan hingga hari ini. Para pengikut baik dari kubu konservatif maupun liberal saling menyerang dengan mengemukakan dalil atau doktrin kebenaran masing-masing dan tentu saja klaim mereka pandangan musuh adalah keliru.

Padahal, merunut citra FPI (Front Pembela Islam) saat ini yang "melunak" yang ditengarai dari pernyataan Habib Rizieq yang hendak membantu mengamankan umat Kristiani dalam melakukan Perayaan Natal 2011, sedikit memperlihatkan sikapnya yang mulai bergeser.<sup>2</sup> Fakta ini mempersulit posisi polemik konservatisme versus liberalisme Islam, karena dari berbagai kasus yang sering terjadi, baik konservatif maupun liberal berada dalam spektrum

1 Pandangan ini melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang tetap, tak goyah dan esensial. Ada cara yang dianggap paling benar dan paling baik menuju tujuan kemanusiaan yang paling ideal. Semisal pandangan keagamaan dalam cara melihat kelompok agama lain dan perbedaan, mereka menganggap dirinyalah yang paling superior. Lihat perdebatan ini dalam Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. (London: MacMilland Press LTD. 2000)

2 Lihat misalnya, FPI: Haram Hukumnya Ganggu Agama Lain. Habib Rizieq menyatakan bahwa, "Biarkan umat Kristiani percaya agamanya yang paling benar dan biarkan umat Muslim percaya agamanya yang paling benar," kata Habib Rizieq di kediamannya, Kamis (22/12/11). <http://www.kedaiberita.com/index.php/Nasional/fpi-haram-hukumnya-ganggu-agama-lain.html>.

yang dinamis, tidak jarang masing-masing bisa bertukar tempat.<sup>3</sup>

Menempatkan konflik Islam-Kristen berada dalam kardus masalah keagamaan sama problematisnya dengan melihat hubungan konfliktual Cina dan non-Cina di Indonesia sebagai persoalan perbedaan ras atau etnis semata. Konflik yang mengakibatkan korban massal di kalangan etnis Cina di Indonesia terjadi tahun 1998. Konflik ini tidak serta merta menjawab dengan tuntas faktor-faktor yang memicu aksi kekerasan tersebut. Kenapa isu anti Cina muncul bersamaan dengan krisis politik 1997? Begitu pula dengan relasi Islam Kristen yang melahirkan konflik di beberapa daerah. Persoalan antara pengikut gereja HKBP di Bekasi dengan warga setempat dan kasus penutupan gereja GKI Yasmin di Bogor Jawa Barat adalah contoh paling mutakhir. Melalui dua kasus ini terendus adanya sikap intoleransi dan main hakim sendiri dalam menolak keberadaan atau pembangunan rumah ibadah. Benarkah

intoleransi ini timbul semata sebagai persoalan konservatisme beragama? Jika benar intoleransi lebih dikarenakan sebagai persoalan hubungan antar agama, kenapa di tempat-tempat lain tidak terjadi? Kenapa persoalan intoleransi masyarakat setempat terhadap pemberian ijin pembangunan rumah ibadah terjadi di tempat tertentu sementara di tempat lain tidak terjadi bahkan memperlihatkan hubungan damai?

Persoalan intoleransi terhadap penghalangan kebebasan beragama jelas merupakan persoalan serius. Negara-negara yang menyetujui pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kerangka aturan hukum (*rule of law*) tak dapat dibenarkan melakukan pembiaran terhadap munculnya intoleransi yang melahirkan kekerasan. Namun seperti dijelaskan di muka, masalah keyakinan dan timbulnya intoleransi yang menimbulkan kekerasan akhir-akhir ini masih dilihat dalam kacamata *commonsense* di mana kekerasan yang ditimbulkan semata-mata dilihat sebagai konservatisme beragama. Polemik di antara kelompok "konservatif dan moderat" terus mempengaruhi kecenderungan publik tanpa melihat lebih jauh bahwa dua cara pandang ini sebenarnya bukan sumber masalah, melainkan hasil dari berbagai masalah sosial yang timbul.

Sayangnya, kajian-kajian sosial terkait kehidupan keagamaan di Indonesia belum mampu memprovokasi timbulnya kajian-kajian inovatif yang mampu melihat persoalan konflik, hubungan minoritas-mayoritas khususnya terkait dengan

3 Kelenturan beralih sikap juga terjadi di dalam tubuh Partai Politik Islam PKS yang selama ini dianggap dekat dengan kelompok Islam garis keras. Misalnya seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminudin. Ia mengatakan deklarasi sebagai partai tengah dan terbuka bukan sekadar strategi, tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam. PKS menerima pluralitas sebagai ketentuan Tuhan bahwa tidak ada keseragaman tetapi keberagaman. Itu muncul dari keyakinan dan keimanan. "Koalisi politik di dalam Pilkada sama sekali memperlihatkan inkonsistensi ini. Di beberapa tempat, PKS dengan mudah berkoalisi dengan partai nasionalisme sekuler, bahkan dengan partai yang basis pengikutnya dari kelompok non-Muslim. lihat misalnya, PKS: Jadi Partai Terbuka Adalah Ajaran Islam. Di Papua ada nonmuslim menjadi anggota DPRD dari PKS. Juga mulai merangkul warga Tionghoa. <http://politik.vivanews.com/news/read/158845-dua-pengalaman-berharga-pks-ke-keterbukaan>.

kehidupan keagamaan di Indonesia. Menyelami *setting* sosial dan mendalami seluruh dimensinya terkait masalah "konflik agama" adalah agenda penting yang perlu disemai terus menerus. Meskipun sumber-sumber sosial yang mendorong konflik tidak bisa ditelusuri dan dijelaskan dari satu faktor atau satu dimensi saja, pekerjaan penelitian dan riset mengenai persoalan-persoalan ini penting didorong lebih progresif demi mendapatkan referensi yang memadai yang kelak dapat mendorong kesadaran publik dalam memahami kasus-kasus kekerasan di Indonesia. Di Indonesia kajian-kajian sosial jauh dari menjelaskan sebab-sebab sosial. Persoalan sosial kurang menarik dan jarang didiskusikan dalam perdebatan publik, sebaliknya, prokontra pandangan keagamaan (konservatif versus liberal/moderat) terasa dibesar-besarkan dan menjadi debat kusir.<sup>4</sup>

Dewasa ini, kajian-kajian Islam, kajian tentang kehidupan keagamaan, khususnya menyangkut Islam-Kristen masih berada dalam dua kecenderungan besar. Pertama, konflik yang terjadi dikalangan kelompok beragama lebih banyak dilihat sebagai hasil dari masalah konflik antar elite politik yang saling bertikai. Kedua, konflik keagamaan, khususnya terkait dengan semakin meningkatkan radikalisme atau konservatisme Islam akhir-akhir ini dilihat sebagai hasil dari

pertarungan global antara Barat-sekuler dengan Timur (Islam Timur Tengah). Meskipun dua kecenderungan ini berhasil menelusuri persoalan sosial duniawi di balik masalah keagamaan, namun kajian ini cenderung elitis. Persoalan konflik keagamaan, masalah-masalah radikalisme cenderung dilihat sebagai hasil dari pertarungan kaum elite, baik elite di tingkat nasional, maupun elite di panggung internasional. Meskipun fenomena elite tidak dapat dinafikan dan memberi pengaruh yang besar bagi dinamika keberagaman di Indonesia, kajian ini mengesampingkan keberadaan arus bawah yang terdiri dari sekumpulan individu atau kelompok yang justru berada di pusat episentrum konflik itu sendiri.

Sangatlah penting memahami bahwa "konflik agama" yang terjadi selama ini, khususnya di seputar relasi Islam-Kristen yang menyinggung relasi mayoritas-minoritas penting dilihat sebagai konflik sosial dan bukan konflik agama. Meskipun kerap diberi label konflik agama, sebenarnya konflik ini bukan masalah keagamaan *ansich* dan tidak bisa dianggap sebagai faktor yang berdiri sendiri. Konflik agama pada hakekatnya bisa ditelusuri sumber penyebab, pemicu, dan akar masalahnya secara sosial. Kajian-kajian elite seperti dikemukakan di atas berhasil menelusuri persoalan sosial politik di balik isu konflik agama. Akan tetapi penelusuran sumber-sumber sosial sebatas pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap sebagai kelompok elite. Dalam studi sebelumnya, George Aditjondro telah memaparkan bahwa

4 Contoh paling jelas hal ini adalah sajian debat kusir dalam siaran televisi nasional, Tvone. Beberapa kali acara debat kusir menyuguhkan panorama pendapat antara kelompok konservatif/garis keras dengan kelompok yang dianggap mewakili kalangan Islam liberal yang pandangan keagamaannya dianggap moderat.

apa yang selama ini disebut konflik agama di beberapa tempat yang melibatkan konflik berdarah antara pihak Islam dan Kristen di Ambon dan Poso sesungguhnya adalah konflik sosial. Aditjondro berhasil mengurai fakta-fakta sosial di luar persoalan pemahaman keagamaan sebagai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik antara kelompok Islam-Kristen tersebut.<sup>5</sup> Deskripsi Aditjondro memperlihatkan faktor agama sebagai faktor pemantik, sementara rumput-rumput yang dengan mudah terbakar oleh pemantik itu dilukiskan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan konflik perebutan sumber-sumber ekonomi antar kelompok bersandingan dengan kepentingan militer dalam memperbesar kekuasaan mereka di pelosok-pelosok terkait dengan eksploitasi sumber daya.

Lepas dari keterbatasan Aditjondro dalam menelusuri faktor-faktor sosial di balik "konflik agama", Aditjondro setidaknya berhasil meruntuhkan tesis yang mendasarkan masalah konflik terkait relasi mayoritas-minoritas dan menolak konservatisme keagamaan sebagai sumber masalah. Dengan kata

lain, konservatisme keagamaan tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat jika ditempatkan sebagai sumber persoalan. Menurut Emile Durkheim, kesadaran keagamaan adalah produk sosial. Menurutnya, agama bukanlah khayalan belaka, tapi agama adalah sesuatu yang nyata, yang merupakan gambaran dari ekspresi sosial itu sendiri. Tidak ada masyarakat tanpa agama. Agama adalah ekspresi dari kesadaran kolektif kita, *which is the fusion of all of our individual consciousnesses, which then creates a reality of its own* (yang merupakan perpaduan dari semua kesadaran pribadi kita, yang kemudian menciptakan realitas sendiri).

Bertolak dari pandangan ini, timbulnya masalah minoritas (agama) dengan demikian perlu dilihat sebagai *output* dari pertarungan posisi sosial yang berada di arena sistem yang timpang. Relasi mayoritas-minoritas adalah hasil dari pertarungan-pertarungan itu. Melalui kajian multikulturalisme, perdebatan minoritas diletakkan di dalam ruang lingkup pembicaraan mengenai minoritas yang tidak semata-mata berhubungan dengan sekelompok kecil masyarakat (kecil dari segi jumlah). Minoritas di sini menjadi masalah krusial ketika sekelompok kecil masyarakat memperlihatkan ciri budaya terutama ekspresi keagamaan atau keyakinan spesifik yang berbeda secara asimetris dengan penduduk setempat. Cara pandang yang berbeda tidak jarang melahirkan pandangan-pandangan yang konfliktual di antara mereka. Ke-minoritas-an dipicu oleh perbedaan-perbedaan sudut pandang, sementara itu, menurut

5 Studi-studi Aditjondro memperlihatkan konflik sosial di Poso dan Maluku/Ambon sebagai konflik yang ditengarai banyak pihak sebagai konflik agama sebagai konflik yang dipicu oleh kepentingan bisnis militer. Lihat, <http://www.oocities.org/kariu67/gja110402.htm>, George Aditjondro, (1998). Dari Soeharto ke Habibie: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari: Kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru. Jakarta: MIK & Pijar Indonesia, George Aditjondro, (2001a). "Guns, pamphlets and handie-talkies: How the military exploited local ethno-religious tensions in Maluku to preserve their political and economic privileges." Dalam Ingrid Wessel & Geogrie Wimhoef (eds), *Violence in Indonesia*, (Hamburg: Abera) hlm. 100-128

Bourdieu, perbedaan sudut pandang adalah hasil dari perbedaan-perbedaan posisi sosial yang terbentuk dari dialektika sistem.

Seperti kita lihat di Indonesia, masalah minoritas dapat dilihat dari seberapa jauh masalah perbedaan dikelola dalam perputaran produksi wacana, bagaimana relasi Islam-Kristen dikembangkan sekaligus dikontestasikan. Persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai satu kasus dengan sumber-sumber pemicunya yang terbatas. Dengan kata lain, relasi Islam-Kristen yang di beberapa tempat memperlihatkan situasi krisis tidak dapat ditarik sebagai masalah perbedaan keagamaan *ansich*. Spektrum krisis yang menciptakan ketegangan agama perlu dilihat sebagai persoalan sistemik yang melibatkan multifaktor secara berkait-kelindan dalam konteks sosial tertentu.

Lebih-lebih dalam konteks relasi Islam-Kristen, di Indonesia hubungan ini memiliki sejarah sosial yang berlangsung sejak lama. Konflik antara Islam-Kristen pada masa kolonial adalah hasil dari pergeseran sosial dan ketimpangan sistem masa itu. Sementara pada masa paska kemerdekaan sampai Orde Baru, perbedaan-perbedaan timbul sebagai akibat dan menjadi efek tak terelakkan dari wacana pembangunan nasional. Baik masa kolonialisme maupun Orde Baru, krisis Islam-Kristen terjadi sebagai akibat dari konflik vertikal, negara versus masyarakat. Beberapa studi menunjukkan perlawanan terjadi di kantong-kantong komunitas Muslim sebagai akibat

dari penetrasi negara melalui proyek pembangunan nasional yang dianggap sebagai bagian dari upaya westernisasi.<sup>6</sup> Khususnya di Indonesia, westernisasi kerap dipahami, setidak-tidaknya dicampuradukkan dengan isu kristenisasi.

Dengan kata lain, perlawanan yang timbul di komunitas Islam dipicu oleh alasan mereka yang menganggap pembangunan nasional yang berlangsung bias dengan ideologi Barat. Citra nasional dalam proyek pembangunan ini dianggap tidak dapat mengakomodasi penduduk dari komunitas Muslim. Nasional menjadi persoalan tersendiri mengingat di dalamnya justru ditengarai sebagai proses hegemoni dan kolonisasi etnis, agama, atau ideologi Barat yang bertujuan memberangus seluruh nilai-nilai lain (baca: pembaratan). Maka selama beberapa periode, masalah kolonisasi pembangunan yang menciptakan efek perlawanan di Indonesia memicu persoalan keagamaan. Di Indonesia efek perlawanan ini menstimulasi gerakan Islam yang secara asimetris berhadapan dengan rezim-rezim pembangunan. Sebagaimana diperlihatkan pada masa pemerintahan kolonial, efek pembangunan melibatkan politik segregasi sosial dan memperlebar disintegrasi di antara komunitas beragama.

Seperti terjadi di negara-negara berpenduduk Muslim lain, modernisasi yang digerakkan melalui proyek pembangunan nasional dituding sebagai

6 Lihat misalnya Robert D Lee, *Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun* (terj). (Bandung: Mizan, 2000)

proses westernisasi dan sekularisasi. Pembangunan kerap kali dipahami sebagai kelanjutan dari imperialisme. Menghadapi masalah ini, ideologi-ideologi berbasis keagamaan menjadi sumber paling menggairahkan bagi usaha-usaha untuk meningkatkan gerakan perlawanan. Sepanjang paruh pertama abad 20, sejarah perlawanan terhadap negara jajahan di berbagai negara dunia ketiga memperlihatkan ciri gerakan keagamaan. Di Indonesia terdapat tokoh seperti HOS Cokroaminoto yang berusaha menggabungkan gerakan sosialisme dengan wacana Islam.

Seturut perkembangan Pan Islamisme, gerakan-gerakan Islam di Indonesia menyongsong era baru dalam usahanya melawan kolonialisme Barat. Tafsir terhadap kolonialisme seperti ini dikembangkan sedemikian rupa. Adanya bentuk-bentuk perlawanan yang dikreasi melalui tafsir keagamaan perlu dilihat sebagai perlawanan-perlawanan terhadap sistem yang menindas.

### **Diskursus Kolonial Dan Paska Kolonial**

Dalam diskursus kolonialisme di Indonesia, hampir semua sumber sejarah tak bisa menolak fakta bahwa relasi Islam dan kolonialisme lebih diwarnai oleh hubungan yang antagonis. Antropolog paling populer sepanjang sejarah penulisan Islam masa kolonial adalah Christian Snouck Horgronje (1857-1936 M), orientalis Belanda yang mendalam meneliti Islam di Aceh. Dilihat dari jejak karya Snouck beserta biografinya, mem-

perlihatkan betapa istimewanya komunitas Muslim Indonesia di mata etnolog kolonial ini. Karya-karya Snouck tentang Islam merentang panjang, dan sepanjang perjalanan kolonialisme Belanda, karya-karya Snouck selain terbilang produktif, gagasannya mempengaruhi para pengambil kebijakan kolonial di Indonesia. Salah satu usulan Snouck adalah diperlukannya perhatian kepada kegiatan-kegiatan Islam di kalangan pribumi dengan ciri tindakan yang berbeda-beda. Menurut Snouck, sejauh Islam dipraktekkan sebagai ajaran ritual dan peribadatan, pemerintah kolonial Hindia Belanda wajib melindungi dan memberi kebebasan kepada para pemeluknya. Namun sebaliknya, terhadap praktek Islam yang diselenggarakan untuk tujuan politik, pemerintah melakukan kontrol ketat, tidak jarang melakukan pemberangusan terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai.

Sepanjang periode kolonialisme di Indonesia, berbagai praktek Islam mengajarkan sikap anti terhadap kolonialisme. Tidak sedikit dari sumber-sumber ajaran Islam waktu itu menuduh kolonialisme sebagai praktek kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Reproduksi pengetahuan ini semakin gencar ditanamkan di kalangan penduduk dan anak-anak muda karena orang-orang pribumi tidak tertampung ke dalam sistem pendidikan modern yang dibentuk kolonial. Beriringan dengan politik segregasi kolonial, pendidikan modern yang dibentuk kolonial Belanda faktanya hanya bisa dinikmati oleh golongan

tertentu dari kalangan pribumi.

Sebaliknya, popularitas pendidikan modern kurang populer dibandingkan dengan lembaga pesantren sebagai pusat pendidikan rakyat yang dapat tumbuh sampai ke pelosok pedesaan. Dikotomi antara pesantren dan pendidikan modern ini semakin memperlebar pengetahuan dan "angan-angan sosial" antara visi kolonialisme dengan umat Islam di Indonesia. Kebijakan kolonial sendiri melegalkan bentuk-bentuk segregasi antar kelompok sosial di mana penduduk Indonesia dibedakan berdasarkan ras dan kedudukan ekonomi. Kondisi ini semakin memperburuk antagonisme Islam. Meskipun demikian, diakui atau tidak, keberadaan kolonial Belanda sejak masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC, Perserikatan Perusahaan Hindia Timur Belanda, mulai menjajah tahun 1602 M) menunjukkan kecerdasan mereka dalam menanamkan kekuasaannya di Indonesia.

Sebagaimana usulan Horgronje, kegiatan politik umat Islam yang dianggap membahayakan dibatasi. Sebaliknya, pemerintah bersedia menyokong kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang tidak bertujuan politik. Meskipun kolonial Belanda menyadari potensi radikal umat Islam, namun keberadaan pesantren sendiri tidak gampang dibatasi. Bisa jadi bagi pemerintah kolonial sendiri, keberadaan pesantren lebih mudah dipantau, diidentifikasi, sekaligus dilokalisasi jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Daripada pemerintah kolonial harus menanggung akibat dari berbagai

pergolakan yang muncul dari gerakan klandestain (gerakan intelektual diam-diam atau rahasia), keberadaan pesantren yang terus berkembang sebagai pusat pendidikan populer di kalangan pribumi dianggap jauh lebih terkontrol.

Namun dikotomi pusat pendidikan antara pesantren dan pendidikan modern memicu pertumbuhan antisekularisme di Indonesia. Di kalangan Islam sendiri meskipun terdapat perbedaan dalam cara melihat "sang kolonial",<sup>7</sup> hampir menjadi pengetahuan yang merata di tengah-tengah Muslim waktu itu bahwa pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak mewakili aspirasi mereka. Kondisi yang berbeda dialami oleh komunitas-komunitas Kristen pribumi. Meskipun sebagian besar kebijakan kolonial Belanda terkesan sekuler, perlakuan terhadap orang-orang pribumi Kristen sama sekali berbeda dengan pribumi Islam. Identitas agama turut menentukan derajat kedekatan dengan elite-elite Belanda waktu itu sekaligus membentuk imej (citra) yang berbeda di kalangan pribumi sendiri. Kristen bagaimanapun memperlihatkan citra tempelan kolonial, bagi beberapa kaum pribumi sendiri lompatan menjadi Kristen sama artinya mendaki

7 Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana modernisasi yang digencarkan melalui kebijakan kolonial direpson secara berbeda-beda oleh elite-elite Islam waktu itu. Golongan Islam modernis seperti Muhammadiyah waktu itu dengan sikap tangan terbuka menerima seluruh nilai-nilai ke-modern-an seperti, bersikap rasional, harapan terhadap kemajuan, perubahan budaya, dan lain-lain. Sebaliknya, kelompok Islam Tradisional terus menggen-carkan perlawanan hingga ke bentuk perang-perang simbol terhadap apapun yang dianggap sebagai modern yang diditinkan dengan praktik kaum kafir.

ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi (dalam arti lebih dekat dengan elite yang berkuasa waktu itu). Setidaknya di sebagian kelompok Islam pribumi, citra seperti ini kelihatan lebih terang. Beberapa gerakan Islam membentuk sikap ideologisnya dengan menegaskan bahwa penolakan terhadap westernisasi dan sekularisasi berada dalam satu paket dengan penolakan dengan kristenisasi.<sup>8</sup>

Ini semua menunjukkan keistimewaan komunitas Islam di Indonesia. Jika sedikit diringkas, keistimewaan ini terkait dengan perbedaan-perbedaan yang diciptakannya. Sebagian kelompok Islam waktu itu dapat dianggap "keras kepala" ditinjau dari sudut pandang kolonial. Sepanjang abad 19-20, berbagai pergolakan terjadi di kalangan rakyat Indonesia sebagai reaksi perlawanan dan ketidakpuasan terhadap rezim kolonial. Sebagian besar pemberontakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam. Misalnya pemberontakan-pemberontakan di pedesaan sebagai reaksi terhadap penindasan terhadap petani banyak disokong oleh guru-guru agama, ustadz, kiai-kiai pesantren.<sup>9</sup> Perlawanan paling kuat dan

hampir melumpuhkan pemerintahan Hindia Belanda adalah perang Diponegoro (1825-1830 M).

Sampai abad 20, perlawanan umat Islam tidak menyusut. Gelombang perlawanan ini semakin menguat seturut gerakan Pan Islamisme ke Nusantara. Gerakan yang dimulai oleh Jalaluddin Al-Afghani ini menginspirasi berbagai gerakan sosial di Indonesia. Kekuatan dari gerakan ini justru gencar dilangsungkan di tengah jantung kolonial itu sendiri, yakni di pusat-pusat perkotaan di mana perubahan-perubahan yang dilakukan kolonial kelihatan lebih nyata. Tidak lain, para pelopor gerakan ini adalah kaum terpelajar perkotaan yang selama ini menerima dampak langsung atas kebijakan-kebijakan kolonial itu sendiri.<sup>10</sup> Berkebalikan dengan gerakan-gerakan sebelumnya, gerakan ini terlibat dalam merintis perbincangan mengenai nasionalisme Indonesia, memdayakan kekuatan-kekuatan media modern (koran, radio, pertemuan-pertemuan diskusi, dan seterusnya), dan jaringan-jaringan yang lebih luas di kalangan kelompok terpelajar.

Pada masa berikutnya, ketika kemerdekaan tercapai, terbentuk rezim politik paska kolonial, perlawanan atas nama Islam tidak sepenuhnya menyusut. Misalnya pada masa revolusi kemerdekaan, beberapa kelompok Muslim

8 Lihat doktrin Dewan Dakwah Islamiyyah, lembaga Islam yang pernah diketuai oleh M.Natsir. Seperti dilansir dalam garis Kebijakan dan Pola Kerja (halaman 146): "Para du'at harus memperluas wawasan dengan mengetahui sistem nilai atau ideologi agama dan paham-paham yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang bertebaran hidup dilingkungannya. Paham-paham yang pesat perkembangannya di-antaranya adalah paham-paham nasionalis, sekularisme, zionis, kristianis, harakah-haddamah dan komunisme".

9 Lihat Sartono Katodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1818* (terj), (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya 1984)

10 Dalam hal ini, menarik sekali membaca ulasan Farhan Bulkin terkait kebangkitan nasionalisme di Indonesia yang dihubungkan dengan kepentingan kelas menengah waktu itu.

terus memperjuangkan hadirnya negara Islam sebagai tandingan dari negara kolonial yang bersumber dari ajaran kaum kafir. Berakhirnya kolonialisme tak lantas merubah cara pandang sebagian umat Islam terhadap sistem pemerintahan yang ada. Pemberontakan-pemberontakan di sejumlah daerah kembali muncul dengan mengatasnamakan gerakan Islam. Peristiwa konflik DI/TII di Jawa Barat oleh Kartosuwirjo, DI/TII di Sulawesi Selatan oleh Qahhar Muzakkar menunjukkan antagonisme yang terus berlangsung antara Islam versus negara. Pemerintahan Soekarno kurang berhasil membujuk elite-elite yang dikecewakan dan tersingkir oleh gelombang revolusi. Pemberontakan-pemberontakan seperti ini bahkan di beberapa tempat memperoleh simpati di kalangan rakyat selama beberapa periode.

Pada masa Orde Baru ketegangan Islam versus negara terus berlangsung. Islam dikondisikan sebagai ancaman oleh Orde Baru. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang represif, beberapa kali terjadi ketegangan politik yang berujung konflik antara pemerintah dengan kekuatan Islam. Peristiwa Tanjung Priok, konflik berdarah Talangsari Lampung, pengeboman Borobudur, adalah beberapa peristiwa konflik Islam versus negara. Memang menjadi berlebihan jika menyatakan golongan pemberontak ini mewakili aspirasi umat Islam pada umumnya. Akan tetapi betapa tidak mudahnya pemerintah Soeharto menjinakkan umat Islam waktu itu merupakan fakta yang sulit dibantah. Di bawah kurungan

rezim politik yang represif, pergolakan di kalangan umat Islam terus terjadi. Gelombang protes dan ketidakpuasan terhadap proses perubahan akibat pembangunan terus terjadi.

Istilah "umat Islam dianaktirikan oleh pemerintah" kerap direproduksi oleh sebagian elite Islam waktu itu. Fakta ini menunjukkan betapa minoritas dipandang oleh komunitas Muslim tidak semata sebagai fakta adanya kelompok-kelompok yang berada di luar komunitas Islam dengan identitas yang beragam, akan tetapi minoritas justru menjadi sebetuk mental yang mendominasi cara pandang umat Islam dalam melihat perbedaan. Sebagian kelompok Islam menganggap pembangunan sebagai persoalan penyimpangan akidah. Tugas mereka adalah mengingatkan terjadinya penyimpangan akidah tersebut.

Meskipun umat Islam menjadi mayoritas di Indonesia, selama beberapa periode di bawah tekanan pemerintahan Soeharto, hubungan agama (Islam) dan negara terus berada dalam silang sengketa. Pemahaman klasik mengenai modernisasi yang mengakibatkan hubungan-hubungan keagamaan di masyarakat yang semakin longgar tidak terbukti. Sebaliknya, tuntutan umat Islam terhadap pemerintah untuk melonggarkan ekspresi keberagamaannya yang tak pernah dipenuhi semakin menciptakan konfrontasi. Misalnya peristiwa ini terjadi pada tahun 1974, di mana terjadi tuntutan terhadap pemerintah untuk memenuhi hak menjalankan "syariah". Golongan Islam mengusulkan

Undang-Undang (UU) Perkawinan yang salah satu isinya menegaskan larangan perkawinan beda agama. Konfrontasi terhadap perkawinan beda agama mempersulit pendirian yang lebih moderat dan terbuka dalam menyimak perubahan-perubahan yang terjadi. Pada masa ini, proyeksi umat Islam mengenai masa depan bersifat asimetris dengan apa yang selama ini dibayangkan oleh pemerintah. Pendirian umat Islam yang memperjuangkan UU ini harus dilihat sebagai meningkatnya gejala konservatisme. Dalam konteks seperti apa dan mengapa gejala ini menguat di kalangan umat Islam menjadi penting untuk dicermati.

Gejala ini timbul karena gejolak politik, sebagian karena friksi di kalangan elite. Konflik ini berhubungan dengan kepentingan kelompok yang tidak diakomodasi oleh rezim yang ada. Orde Baru tidak menginginkan pengaruh Islam berkembang lebih luas. Pemahaman terhadap falsafah Pancasila tidak dapat menampung aspirasi-aspirasi politik keagamaan. Padahal, dalam kekuasaan kolonial Belanda, kelompok Islam menikmati dualisme hukum, yakni tunduk pada hukum kolonial sembari pada saat yang sama hukum kolonial mengakomodasi beberapa hukum syariat Islam. Unifikasi hukum yang dikehendaki pemerintahan Orde Baru tidak disambut dengan tangan terbuka. Kehendak untuk melakukan unifikasi hukum justru dicurigai sebagai bagian dari skenario kristenisasi. Jadi, konflik dan ketegangan seputar isu islamisasi dan kristenisasi menjadi ganjalan sekaligus menciptakan

sikap perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang mengakomodasi kepentingan Islam.

Isu kristenisasi mencuat sebagai respon atas golongan militer yang memperlihatkan sikap *islamophobia* (ketakutan terhadap Islam). Benny Murdani dikenal sebagai elite militer yang paling getol melancarkan serangan terhadap radikalisme Islam. Pandangan Murdani semakin membunyah bersamaan dengan peristiwa kekerasan; pengeboman terhadap Candi Borobudur, konflik Lampung, dan lain-lain. Di pihak lain, Murdani dituding sebagai otak yang turut memojokkan kelompok Islam. Bahkan kedekatan Murdani dengan Soeharto dan Ibu Tien semakin menciptakan kecurigaan atas upaya-upaya untuk memberangus aspirasi Islam. Kroni-kroni Soeharto dari kalangan non-Muslim terus menjadi bahan pergunjangan di kalangan Islam. Kredibilitas negara terus dipertanyakan oleh elite-elite Islam. Pada masa itu, kristenisasi menjadi persoalan sensitif. Ini misalnya terekam dari sedikit biografi Buya Hamka (1908-1981 M), salah satu tokoh Islam yang berpengaruh pada masa Orde Baru.

Dalam setiap kesempatan khutbah, Buya Hamka yang prihatin dengan gurita kristenisasi yang sedang menggeliat ketika itu, bersuara lantang di hadapan umat agar mewaspadaai sepak terjang kelompok Kristen yang berusaha memurtadkan kaum Muslimin. "Modernisasi bukan berarti westernisasi, dan bukan pula kristenisasi," demikian ketegasan yang sering diulang-ulang oleh

Hamka ketika ditanya para wartawan. Dalam setiap khutbah di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Hamka juga menegaskan bahwa misi zending Kristen yang sedang bergeliat pada masa itu telah dirasuki dendam Perang Salib untuk menghabisi umat Islam. "Kristen lebih berbahaya dari Komunis," ujar Hamka.<sup>11</sup>

Konflik Islam versus Pemerintah kembali terjadi ketika rezim Soeharto memaksa Pancasila sebagai asas tunggal. Seluruh elemen organisasi di masyarakat wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas paling tinggi sebagai asas keorganisasian. Bagi Soeharto sendiri kebijakan ini sebagai upayanya mengorporatisasi masyarakat Indonesia. Sebagai dasar bagi bangunan Orde Barunya,

"Keputusan ini merupakan langkah yang kita ambil guna meletakkan kerangka landasan di bidang ideologi dan politik sebagai persiapan menuju tahap tinggal landas nanti... Tujuan kita tidak lain adalah menunggalkan semua lapisan, golongan, kekuatan dan generasi bangsa kita dengan dasar, ideologi dan cita-cita bangsa dan negaranya. Dengan demikian, seluruh lapisan, golongan dan kekuatan bangsa kita akan dapat terhindar dari konflik-konflik batin dan ketegangan yang menjadi sumber ketegangan-ketegangan yang menjadi sumber perpecahan dan luka-luka bangsa."<sup>12</sup>

Bagi kalangan Islam kebijakan ini jelas pemaksaan. Akibatnya, pemaksaan ini ditanggapi secara polemis di kalangan Islam. Sebagian organisasi Islam menerima, meskipun dengan catatan, sebagian lagi menolak. Penerimaan terhadap kebijakan ini lebih disebabkan oleh sikap kooperatif yang ditempuh oleh lembaga tersebut. Sementara itu, sikap Murdani sendiri yang dikenal berpembawaan keras dan tanpa tedeng aling-aling menampakkan loyalitasnya terhadap bentuk negara Pancasila dan netral terhadap agama menciptakan posisinya sebagai musuh bersama umat Islam. Kekuatannya yang terus tak tertandingi, kemampuannya mendayagunakan kekuatan militer profesional menjadi hantu tersendiri di kalangan kelompok-kelompok sipil. Soeharto dengan kecerdikannya, tak menutup mata dengan ketegangan ini.

Arus balik mulai mengemuka, ketika kekuatan Islam semakin tak bisa dibungkam diberi ruang oleh Soeharto. Bangkitnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dimotori BJ Habibie atas restu Soeharto. Dari perspektif politik, sudut pandang kepentingan Soeharto dan terjadinya pergeseran dan pertempuran antar elite politik di sekitar Soeharto merupakan fakta yang tak bisa dielakkan atas kemunculan ICMI.

Meskipun demikian, di balik kekuatan ICMI yang dikesankan boneka Habibie-Soeharto, beberapa elite dan tokoh Islam turut memainkan peran dalam menyemai "proses islamisasi". Menurut

11 Buaya Hamka dan Sikap Tegas Terhadap Kristenisasi, dalam, [http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=41025:buya-hamka-dan-sikap-tegas-terhadap-kristenisasi&catid=68:islam-dunia&Itemid=175](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41025:buya-hamka-dan-sikap-tegas-terhadap-kristenisasi&catid=68:islam-dunia&Itemid=175)

12 Elson, Robert Edwrad, Soeharto, *Sebuah Biografi Politik*.

(Jakarta: MINDA, 2001) hlm, 459

Robert W Hefner, kebangkitan ICMI dianggap sebagai cermin kebangkitan kelas menengah yang gelombangnya sudah mulai sejak tahun 1980-an. Kebangkitan kelas menengah ini merupakan gelombang yang tak terelakkan seturut perkembangan generasi baru Orde Baru. Di satu sisi, generasi ini merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan baru akibat pembangunan dan modernisasi, di sisi lain, menguatnya kelas menengah Islam diakibatkan oleh kekecewaan-kekecewaan ketika aspirasi generasi ini tak bisa ditampung oleh kekuatan *status quo*.<sup>13</sup> Bukannya kelas ini mengikuti jalur ideologi negara, sebagian besar kelompok kelas menengah baru ini menolak budaya urban yang didominasi oleh sebetuk gaya hidup Barat yang hedonis-sekuler sekaligus mensubversi pola-pola kebijakan negara yang *islamophobia*.

### Paska Orde Baru

#### Relasi Islam-Kristen di Tengah Globalisasi dan Demokratisasi

Deskripsi relasi Islam versus negara seperti di atas tak bisa melihat lebih dekat seberapa jauh kekuatan masyarakat, massa sebagai arus bawah berperan mendinamisasi hubungan-hubungan tersebut. Pada masa Orde Baru, kita tidak dapat berharap banyak atas kajian-kajian sosial yang mengemukakan persoalan ini. Meskipun demikian, gelombang keterbukaan yang sinyalnya mulai dibu-

ka sedikit-sedikit oleh Soeharto di awal 1990-an, patut dijadikan babak baru bagi turut sertanya kekuatan-kekuatan non-elite dalam menentukan arah demokratisasi di Indonesia.

Seturut wacana demokratisasi, kekuatan arus bawah menjadi salah satu aspek yang penting dicermati. Demokratisasi di Eropa Timur, Asia, dan negara-negara Timur Tengah saat ini selain dipicu oleh faktor-faktor elitis, arus bawah dari kalangan masyarakat, di mana mereka lebih cenderung dilihat secara apolitis juga memiliki peran signifikan.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri, bariisan mahasiswa, anak-anak jalanan, dan kalangan masyarakat umum dalam memenuhi jalan-jalan raya di Jakarta dan Yogyakarta 1998 dalam meruntuhkan Soeharto juga merupakan faktor yang tidak bisa dikesampingkan.

Revolusi musim semi di Mesir 2011 disinyalir memiliki kemiripan dengan demokratisasi 1998 di Indonesia. Demokratisasi di Yaman dan Libya, di mana terjadi perlawanan sengit dari ribuan orang yang memadati jalan-jalan di Tripoli turut melawan kediktatoran Khaddafi juga fenomena gejala perlawanan arus bawah. Beberapa sumber menyebutkan demokratisasi ini diperluas oleh perluasan teknologi sosial media yang menjadi fenomena global saat ini. Lepas dari harapan dan imajinasi yang berlebihan atas kekuatan massa ini, keraguan mengenai peran-peran signifikan

13 Lihat, Robert W Hefner, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995)

14 Lihat Politik Arus Bawah, dalam, AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*. (Jakarta: LP3ES, 1996)

mereka juga tidak memiliki argumentasi yang kuat. Jejaring sosial yang terglobalisasi, komunikasi tatap muka yang dimediasi oleh sosial media dan keragaman cara berkomunikasi sebagai akibat dari konvergensi teknologi saat ini memiliki peran penting dalam memperluas arus demokratisasi.

Arus pergulatan mereka ini mau tidak mau memperkuat kembali kebutuhan untuk melihat arus bawah dari kalangan masyarakat yang selama ini kurang dilihat sebagai kekuatan politis. Mereka lebih dilihat sebagai obyek perubahan, tidak jarang peran mereka dihasilkan dari proses mobilisasi yang kurang partisipatif.

Meskipun tidak banyak studi yang secara eksplisit menjelaskan peran politik arus bawah ini, beberapa informasi memberikan petunjuk atas peran dan dinamika saat ini. Misalnya informasi dari hasil survei yang disebar ke masyarakat umum. Contoh paling menarik yang bisa kita analisis lebih jauh adalah terkait survei yang menggambarkan kecenderungan dan dinamika politik anak-anak muda, dan beberapa kelompok masyarakat saat ini. Misalnya, merujuk survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), yang menggambarkan preferensi politik umat Islam saat ini yang sebagian besar tidak lagi memilih partai politik berbasis agama. Meskipun survei ini sekedar mendeskripsikan angka, setidaknya dari survei ini dapat disimpulkan adanya pergeseran penting politik massa umat Islam. Survei ini memperkuat argumentasi lain yang menyatakan bahwa kredibilitas

partai politik berbasis agama semakin menurun. Di pihak lain, kondisi ini menunjukkan kekuatan masyarakat yang semakin mandiri dalam menghadapi gempuran doktrin-doktrin politisasi agama. Persoalan korupsi, kinerja elite politik, dan segudang masalah sosial yang tak tertangani diduga menjadi referensi mutakhir yang mendorong pergeseran kecenderungan umat Islam saat ini.

Kemenangan Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) menjadi presiden pada tahun 2004 dan diteruskan sampai periode kedua, 2009, membuktikan keruntuhan politik berbasis agama. Berdasarkan hasil pemilu 2004, tokoh-tokoh Islam seperti Amien Rais atau Hamzah Haz bukan menjadi pilihan terbanyak umat Islam di Indonesia sebagai presiden. Pilihan paling populer di kalangan umat Islam justru tertuju kepada tokoh SBY, Megawati Soekarnoputri yang notabene bukan dari kalangan santri. Fenomena ini setidaknya menunjukkan bahwa latar belakang agama bukan sandaran bagi pilihan politik penduduk Islam di Indonesia.

Survei berikutnya yang tak kalah menarik adalah maraknya kecenderungan anak muda Muslim yang dianggap mendukung terorisme. Survei ini dilakukan lembaga Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kecenderungan radikalisme keagamaan di sekolah dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan radikalisme tersebut. Penelitian ini dilaku-

kan pada bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011 lalu terhadap siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jabodetabek. Metode yang dilakukan yakni dengan survei melalui wawancara tatap-muka dengan panduan kuesioner. Dari hasil penelitian itu diketahui tiga kecenderungan, yang terbagi dalam: 1. Kecenderungan radikalisme ideologis, 2. Dukungan, Kesediaan & Partisipasi Atas Kekerasan, 3. Tingkat Kesediaan terhadap tindakan.<sup>15</sup> Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Tingkat pengenalan atas organisasi radikal, guru PAI 66,4 %, siswa 25,7 %
- Tingkat kesetujuan atas organisasi radikal, guru PAI 23,6 %, siswa 12,1 %
- Tingkat pengenalan pada tokoh radikal, guru PAI 59,2 %, siswa 26,6 %
- Tingkat kesetujuan kepada tokoh radikal, guru PAI 23,8 %, siswa 13,4 %
- Menangkap atau menghakimi pasangan bukan suami istri, guru 48,2 %, siswa 74,3 %
- Perlawanan terhadap barat atas pengeboman yang dilakukan pelaku teroris, guru 7,5%, siswa 14,2 %
- Membantu umat Islam di daerah konflik bersenjata, guru 37,8 %, siswa 48,9 %
- Penyegehan dan perusakan rumah

ibadah yang bermasalah, guru 40,9 %, siswa 52,3 %.

- Pengrusakan rumah atau fasilitas anggota aliran keagamaan sesat, guru 38,6%, siswa 68,0 %.
- Penyegehan dan perusakan tempat hiburan malam, guru 43,7%, siswa 75,3 %.
- Pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain, guru 32,4%, siswa 43,3 %.
- Pengrusakan dan penyegehan rumah ibadah bermasalah, guru 24,5%, siswa 41,1 %.
- Pengrusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan sesat, guru 22,7%, siswa 51,3 %.
- Pengrusakan tempat hiburan malam, guru 28,1%, siswa 58,0 %.
- Penangkapan dan mengkhakimi pasangan bukan suami istri, guru 51,9%, siswa 33,1 %.

Yang menarik dari survei ini adalah terekamnya pendapat masyarakat, khususnya dari kalangan non-elite yang selama ini tidak pernah disuarakan. Meskipun demikian, pengorganisasian melalui survei jelas bermasalah, karena menyajikan suara massa sebatas angka.<sup>16</sup> Kita

15 Lihat, <http://library.studyicycle.org/category/kasus-terorisme-oleh-remaja/>

16 Metode survei sebagai bagian dari pendekatan positivistik sudah mendapat kritik dari berbagai ahli/ilmuwan sosial. Salah satu kritik itu menyatakan supremasi sang peneliti dengan memperlakukan subyek yang diteliti sebagai obyek (kelinci percobaan). Positivistik yang mengadopsi natural science menempatkan realitas sosial sebagai kenyataan yang memiliki hukum-hukum tetap sudah dipatahkan bahkan sejak era Max Weber.

tidak mesti berhenti dengan penjelasan angka ini. Jika didalami kembali pandangan dari sebagian kelompok masyarakat ini, maka tidak terelakkan betapa persoalan radikalisme, pandangan sumir mengenai keberagaman yang direpresentasikan melalui angka di atas tidak mungkin disimpulkan dan berhenti pada pandangan negatif mengenai sikap keagamaan yang konservatif dan sempit.<sup>17</sup> Survei-survei ini penting didalami kembali dengan memanfaatkan seluruh kajian-kajian sosial progresif yang berkembang saat ini. Berdasarkan kelemahan-kelemahan epistemologis metode survei, adalah penting untuk mengangkat suara-suara masyarakat-bawah, kelompok massa yang selama ini sekedar dijadikan obyek perubahan, termasuk juga obyek penelitian.

Dalam relasi kehidupan keagamaan yang kini berlangsung, maka penting mengangkat suara kekuatan massa yang berada di pusat episentrum konflik. Seperti konflik pemblokiran rumah ibadah di Bekasi dan Bogor menjadi penting menyuarakan orang-orang sekitar, penduduk setempat baik dari kelompok Kristen maupun Islam; persepsi mereka, struktur sosial, dan peristiwa-peristiwa, sosial terkait konflik keagamaan tersebut.

Jadi, masalah minoritas dan konflik

agama, khususnya Islam-Kristen berada di pusat pergulatan sosial yang dinamis. Realitas sosial sangatlah kaya dengan berbagai aktor (yang terus berubah dan dinamis), peristiwa (*events*), konsekuensi yang tak direncanakan atas tindakan sosial dan individu (*unintended consequences of individual and social action*), persepsi atas realitas yang berbeda-beda, kontingensi historis dan seterusnya. Tugas kita semua adalah mencari penjelasan sedetil mungkin bagaimana pandangan-pandangan keagamaan sebagai bagian dari dinamika realitas sosial berlangsung. Itu artinya, kita perlu mencari kerangka-kerangka baru untuk melihat fenomena konflik agama sebagai persoalan sosial (konflik sosial). Lebih-lebih menyangkut hubungan Islam-Kristen dewasa ini, seperti terjadi di Bekasi (konflik tentang gereja HKBP) dan Bogor (konflik tentang GKI Yasmin) dibutuhkan cara dan metode baru untuk mendapatkan penjelasan sosial yang lebih progresif.

Kerja seperti ini sedikitnya akan menyumbang pembangunan sosial yang lebih baik, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan keagamaan yang lebih demokratis. Hadirnya kehidupan keagamaan yang lebih demokratis dengan sendirinya turut merubah konstruksi sosial umat Islam di masa kini dan mendatang, dan tentu saja relasi mayoritas-minoritas dan hubungan sosial lain di tengah masyarakat yang beragam akan dengan mudah dihadapi dengan rasa damai -- meskipun ini bukan sesuatu yang mudah.[]

17 Karena survei ini beberapa lembaga terkait merasa kebakaran jenggot, akibatnya mereka salah menafsirkan hasil survei ini. Misalnya, karena release hasil survei ini terpublikasi secara nasional, beberapa kepala lembaga pendidikan Islam terkait menyatakan kurikulum sekolah Islam tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan.